



UMKM DAN LAPORAN KEBERLANJUTAN

Efva Octavina Donata Gozali, S.E., M.Si., Ak. CA

Ruth S. Hamzah S.E., M.Si.

M. Ikhbar Agustawan

Mutiara Lusiana Annisa, S.E., M.Si.

Dyang Ramadhanty Irm

Dr. Ika Sasti Ferina, S.E., M.Si., Ak. CA **Antonius Dapot P.L. Toruan, S.E.**

UMKM DAN LAPORAN BERKELANJUTAN

UMKM DAN LAPORAN BERKELANJUTAN

Efva Octavina Donata Gozali, S.E., M.Si., Ak. CA

Ruth S. Hamzah S.E., M.Si.

Mutiara Lusiana Annisa, S.E., M.Si.

Dr. Ika Sasti Ferina , S.E., M.Si., Ak. CA

M. Ikhbar Agustiawan

Dyang Ramadhanty Irm

Antonius Dapot P.L. Toruan, S.E.



UMKM DAN LAPORAN BERKELANJUTAN

Penulis:

Efva Octavina Donata Gozali, S.E., M.Si., Ak. CA
Ruth S. Hamzah S.E., M.Si.
Mutia Lusiana Annisa, S.E., M.Si.
Dr. Ika Sasti Ferina, S.E., M.Si., Ak. CA
M. Ikhbar Agustiawan
Dyang Ramadhanty Irmu
Antonius Dapot P.L. Toruan, S.E.

Editor : Dr. Febrianty, SE, M.Si
Layouter : Rizki Amalia, A.Md, Ak.
Cover: Rusli

Cetakan Pertama : Desember 2023

Hak Cipta 2023, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT
Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2023 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2023
; 15,5 x 23 cm
ISBN : 978-623-448-734-3

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan selalu kepada Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah yang sudah diberikan sehingga kami bisa menyelesaikan buku kami yang berjudul UMKM dan Laporan Berkelanjutan. Tujuan dari penulisan buku ini adalah untuk menyebarkan ilmu pengetahuan mengenai laporan berkelanjutan khususnya bagi industri spesifik usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Buku ini juga akan memberikan informasi secara lengkap mengenai manfaat dari faktor-faktor non-ekonomi, terkhusus laporan berkelanjutan, bagi perusahaan dalam mencapai tujuan secara komprehensif dan holistik.

Kami sadar bahwa penulisan buku ini bukan merupakan buah hasil kerja keras kami sendiri. Oleh karena itu, kami ingin mengucapkan rasa terima kasih kami kepada PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit III Plaju, Hibah Bima Dikti, dan Universitas Sriwijaya yang telah mendukung lancarnya proses penulisan buku ini mulai dari proses penulisan hingga proses cetak.

Demikian buku ini kami buat, dengan harapan agar pembaca dapat memahami informasi dan juga mendapatkan wawasan mengenai laporan keberkelanjutan bagi UMKM. Kami sadar bahwa buku yang kami buat masih belum bisa dikatakan sempurna. Oleh karena itu, kami meminta dukungan dan masukan dari para pembaca agar kontribusi yang diberikan dari buku ini bisa bertambah dan menjadi ilmu yang bermanfaat sepanjang masa.

Palembang, September 2023

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I INDIKATOR NON-EKONOMI BAGI PERUSAHAAN	1
1.1 Definisi Indikator Non-Ekonomi	1
1.2 Peran Indikator Non-Ekonomi dalam Perusahaan	1
1.3 Hubungan antara Indikator Non-Ekonomi dan Keberlanjutan	3
1.4 Indikator Lingkungan	4
1.5 Indikator Sosial	5
1.6 Indikator Etika dan Tata Kelola	5
1.7 Manfaat dan Tantangan Indikator Non-Ekonomi	6
1.7.1 Manfaat	6
1.7.2 Tantangan	6
 BAB II ISU LINGKUNGAN	 8
2.1 Definisi Isu Lingkungan	8
2.2 Dampak Isu Lingkungan Terhadap Kemanusiaan dan Ekosistem	9
2.3 Pencemaran Lingkungan	10
2.4 Perubahan Iklim	11
2.5 Kehilangan Keanekaragaman Hayati	11
2.6 Konsep Pembangunan Berkelanjutan	12
2.7 Tantangan dan Hambatan dalam Menangani Isu Lingkungan	13
 BAB III ISU SOSIAL	 15
3.1 Definisi Isu Sosial	15
3.2 Upaya dalam Menangani Isu Sosial	15

BAB IV ISU TATA KELOLA	17
4.1 Definisi Isu Tata Kelola	17
4.2 Upaya dalam Menangani Isu Tata Kelola	17
 BAB V PEMAHAMAN UMKM DI NEGARA BERKEMBANG	 19
5.1 Definisi UMKM	19
5.2 Peran UMKM dalam Perekonomian Negara Berkembang	19
5.3 Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan UMKM	20
5.4 Praktik Keberhasilan UMKM di Negara Berkembang	21
5.5 Kerja Sama Internasional untuk Pertumbuhan UMKM	22
5.6 Tren Global dan Potensi Pertumbuhan	23
 BAB VI LAPORAN KEBERLANJUTAN	 26
6.1 Sejarah Laporan Keberlanjutan	26
6.2 Definisi Laporan Keberlanjutan	26
6.3 Peran Pelaporan Keberlanjutan	27
6.4 Manfaat Pelaporan Keberlanjutan	28
6.5 Isi Laporan Keberlanjutan	29
6.6 Kerangka Kerja GRI (Global Reporting Initiative)	31
 BAB VII KETERKAITAN DAMPAK NON EKONOMI DAN LAPORAN BERKELANJUTAN	 34
7.1 Dampak Lingkungan	34
7.1.1 Definisi Dampak Lingkungan	34
7.1.2 Jenis-Jenis Dampak Lingkungan	34
7.1.3 Pentingnya Memahami Dampak Lingkungan dalam Konteks Bisnis	36
7.1.4 Teknik dan Alat untuk Menilai Dampak Lingkungan	37
7.1.5 Keterkaitan antara Dampak Lingkungan dan Keberlanjutan	39
7.2 Dampak Sosial	41
7.2.1 Definisi Dampak Sosial	41
7.2.2 Jenis-Jenis Dampak Sosial	42
7.2.3 Pentingnya Memahami Dampak Sosial dalam Konteks Bisnis	43

7.2.4	Teknik dan Alat untuk Menilai Dampak Sosial	44
7.2.5	Keterkaitan Antara Dampak Sosial dan Keberlanjutan	45
7.3	Dampak Tata Kelola	46
7.3.1	Definisi Dampak Tata Kelola	46
7.3.2	Jenis-Jenis Dampak Tata Kelola	46
7.3.3	Pentingnya Memahami Dampak Tata Kelola dalam Konteks Bisnis	47
7.3.4	Teknik dan Alat untuk Menilai Dampak Tata Kelola	49
7.3.5	Keterkaitan Antara Dampak Tata Kelola dan Keberlanjutan	49
7.4	Implementasi Prinsip-Prinsip Keberlanjutan dalam Bisnis	51
7.5	Peran Pemerintah dan Regulasi	54
7.6	Tantangan dan Peluang di Masa Depan	56
BAB VIII LAPORAN BERKELANJUTAN YANG ADA DI INDONESIA		60
8.1	Sejarah Laporan Keberlanjutan di Indonesia	60
8.2	Standar dan Pedoman Laporan Keberlanjutan	62
8.3	Tantangan dalam Menyusun Laporan Keberlanjutan	63
8.4	Dampak Laporan Keberlanjutan terhadap Bisnis dan Masyarakat	64
8.5	Peran Pemerintah dan Inisiatif Publik	66
8.6	Peluang di Masa Depan	69
BAB IX LAPORAN KEBERLANJUTAN BAGI UMKM		71
9.1	Keterkaitan Antara Laporan Berkelanjutan dan UMKM	71
9.2	Laporan Berkelanjutan bagi UMKM di Indonesia	72
9.3	Penyusunan Laporan Keberlanjutan bagi UMKM	72
9.4	Pentingnya Laporan Berkelanjutan bagi UMKM	75
9.5	Tantangan yang Dihadapi UMKM dalam Menyusun Laporan Berkelanjutan	78
9.6	Pedoman dan Sumber Daya untuk UMKM	81
9.7	Manfaat Ekonomi dan Sosial Bagi UMKM	84
9.8	Langkah-Langkah Implementasi Laporan Keberlanjutan	87

9.9 Mendukung Keberlanjutan Global melalui Laporan Keberlanjutan UMKM	90
GLOSARIUM	94
DAFTAR PUSTAKA	100
BIODATA PENULIS	115

BAB I

INDIKATOR NON-EKONOMI BAGI PERUSAHAAN

1.1 Definisi Indikator Non-Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh indikator non-ekonomi perusahaan. Faktor non-ekonomi termasuk perubahan perspektif, nilai-nilai sosial, pendidikan yang mendorong penalaran (*reasoning*), dan semangat yang menghasilkan banyak penemuan baru (Malindar & Oratmangun, 2021). Selain itu, jika perusahaan memiliki prospek yang baik untuk masa depan, informasi non-keuangan juga dapat memberikan indikator kinerja ekonomi. Indikator ini menjelaskan posisi perusahaan saat ini dan masa depan, serta bagaimana perusahaan dapat mengelola biaya produksi dan pemasaran (Ikbal, 2018). Selain itu, tata kelola perusahaan yang baik juga merupakan indikator informasi non-keuangan yang penting bagi investor, manajemen, dan pemerintah. Para pemerhati akuntansi sosial berpendapat bahwa informasi non-keuangan diperlukan untuk mengevaluasi dampak negatif dari berbagai pihak, seperti regulator (pemerintah, komunitas lokal yang terkena dampak, atau kelompok aktivis lingkungan.

1.2 Peran Indikator Non-Ekonomi dalam Perusahaan

Indikator non-ekonomi penting untuk dipertimbangkan dalam analisis pembangunan ekonomi, karena mereka dapat memberikan informasi tentang kualitas dan sosial dari pembangunan ekonomi, yang seringkali lebih penting daripada hanya fokus pada angka pendapatan atau PNB.

Beberapa contoh indikator non-ekonomi meliputi Indeks Kualitas Hidup (IKH), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatnya penggunaan sanitasi yang sehat, meningkatnya fasilitas air bersih, dan kelembagaan-kelembagaan ekonomi modern. Indikator non-ekonomi penting untuk dipertimbangkan

dalam analisis pembangunan ekonomi, karena mereka dapat memberikan informasi tentang kualitas dan sosial dari pembangunan ekonomi, yang seringkali lebih penting daripada hanya fokus pada angka pendapatan atau PNB.

Indikator non-ekonomi dalam perusahaan merujuk pada faktor-faktor yang tidak secara langsung berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi yang mempengaruhi keberhasilan dan kondisi kerja sama. Berikut adalah beberapa peran indikator non-ekonomi dalam perusahaan:

a. Perubahan pandangan

Perubahan perspektif masyarakat terhadap suatu barang atau jasa dapat mempengaruhi kinerja bisnis. Jika perspektif masyarakat positif, maka kinerja bisnis akan lebih baik.

b. Nilai-nilai sosial

Perusahaan juga dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat. Jika perusahaan dapat mengikuti nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat, kinerja perusahaan akan lebih baik.

c. Pendidikan membawa ke arah penalaran (*reasoning*)

Pendidikan yang baik dapat meningkatkan penalaran masyarakat, yang dapat berdampak pada kinerja bisnis karena masyarakat akan lebih cerdas dalam memilih barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan.

d. Semangat yang menghasilkan berbagai penemuan baru

Semangat tinggi untuk inovasi dan penemuan baru dapat memengaruhi kinerja bisnis. Masyarakat akan lebih memilih bisnis yang dapat membuat barang atau jasa baru.

e. Tata kelola perusahaan yang baik

Tata kelola perusahaan yang baik dapat mempengaruhi kinerjanya. Perusahaan dengan tata kelola yang baik akan lebih dipercaya oleh masyarakat dan investor, yang berarti kinerjanya akan lebih baik..

f. Aksi perusahaan

Dalam bidang non-keuangan, tindakan perusahaan menunjukkan transparansi, dan tindakan ini dapat berdampak pada kinerja perusahaan karena masyarakat akan lebih percaya pada perusahaan yang transparan dalam menjalankan bisnisnya.

g. Independensi kepemilikan

Dengan kepemilikan yang independen, perusahaan lebih dipercaya oleh masyarakat dan investor.

h. Kualitas laporan keuangan

Selain metrik non-keuangan, laporan keuangan yang baik menunjukkan bahwa perusahaan memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya bagi masyarakat dan investor.

i. Jumlah struktur GCG

Kinerja perusahaan juga dapat dipengaruhi oleh jumlah struktur GCG. Perusahaan dengan struktur GCG yang baik akan lebih dipercaya oleh masyarakat dan investor.

1.3 Hubungan antara Indikator Non-Ekonomi dan Keberlanjutan

Indikator non-ekonomi dapat berhubungan dengan keberlanjutan pembangunan ekonomi suatu negara atau perusahaan. Beberapa indikator non-ekonomi yang dapat mempengaruhi keberlanjutan pembangunan ekonomi antara lain:

a. Kualitas manusia. Indikator ini menggambarkan kualitas manusia sebagai hasil dari pembangunan, yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan pendapatan per kapita. Kualitas manusia yang baik dapat mempengaruhi keberlanjutan pembangunan ekonomi karena masyarakat yang sehat dan terdidik akan lebih produktif dan mampu menciptakan inovasi baru.

b. Aksi perusahaan. Aksi perusahaan merupakan suatu

proksi transparansi dalam bidang non-keuangan. Perusahaan yang transparan dalam menjalankan bisnisnya akan lebih dipercaya oleh masyarakat dan investor, sehingga dapat mempengaruhi keberlanjutan pembangunan ekonomi.

- c. **Independensi kepemilikan.** Independensi kepemilikan juga dapat mempengaruhi keberlanjutan pembangunan ekonomi. Perusahaan yang memiliki kepemilikan yang independen akan lebih dipercaya oleh masyarakat dan investor, sehingga dapat mempengaruhi keberlanjutan pembangunan ekonomi.
- d. **Kualitas laporan keuangan.** Kualitas laporan keuangan juga merupakan indikator non-keuangan yang penting bagi perusahaan. Laporan keuangan yang baik akan memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya oleh masyarakat dan investor, sehingga dapat mempengaruhi keberlanjutan pembangunan ekonomi.
- e. **Tata kelola perusahaan yang baik.** Tata kelola perusahaan yang baik juga dapat mempengaruhi keberlanjutan pembangunan ekonomi. Perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik akan lebih dipercaya oleh masyarakat dan investor, sehingga dapat mempengaruhi keberlanjutan pembangunan ekonomi.
- f. **Kualitas hidup masyarakat.** Indikator ini meliputi pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Semakin tinggi kualitas hidup masyarakat, semakin baik hasil pembangunan ekonomi yang dicapai, sehingga dapat mempengaruhi keberlanjutan pembangunan ekonomi.

1.4 Indikator Lingkungan

Indikator ini meliputi pengelolaan lingkungan hidup oleh perusahaan, seperti pengurangan emisi gas rumah kaca, pengurangan limbah, dan penghematan energi. Indikator lingkungan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan karena

perusahaan yang peduli terhadap lingkungan akan lebih dipercaya oleh masyarakat dan investor (Dwi, 2023). Dengan memperhatikan indikator lingkungan dalam laporan keberlanjutan, organisasi dapat memahami dampak kegiatan bisnisnya terhadap lingkungan dan mengambil tindakan yang sesuai untuk meminimalkan dampak negatifnya. Hal ini dapat membantu organisasi untuk membangun praktik bisnis yang berkelanjutan dan transparan serta meningkatkan kontribusinya terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi.

1.5 Indikator Sosial

Indikator ini meliputi dampak sosial yang ditimbulkan oleh kegiatan perusahaan, seperti kontribusi perusahaan terhadap masyarakat sekitar, kesejahteraan karyawan dimana mengukur kesejahteraan karyawan, seperti upah, tunjangan, dan kondisi kerja. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dan meningkatkan produktivitas kerja, dan kesetaraan gender di tempat kerja, seperti jumlah karyawan perempuan dan laki-laki, kesempatan kerja yang sama, dan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk membangun lingkungan kerja yang inklusif dan meningkatkan reputasi perusahaan. Indikator sosial dapat mempengaruhi kinerja perusahaan karena perusahaan yang peduli terhadap masyarakat dan karyawan akan lebih dipercaya oleh masyarakat dan investor (Dwi, 2023).

1.6 Indikator Etika dan Tata Kelola

Indikator ini meliputi kepatuhan perusahaan terhadap etika dan tata kelola yang baik, seperti kepatuhan terhadap hukum yang mengukur tingkat kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk meminimalkan risiko hukum dan

meningkatkan reputasi perusahaan. Lalu, kebijakan anti-korupsi, dan kebijakan privasi.

Dengan memperhatikan indikator etika dan tata kelola dalam laporan keberlanjutan, perusahaan dapat memahami dampak kegiatan bisnisnya terhadap etika dan tata kelola yang baik serta mengambil tindakan yang sesuai untuk meminimalkan dampak negatifnya. Selain itu, indikator etika dan tata kelola dapat mempengaruhi kinerja perusahaan karena perusahaan yang memiliki etika dan tata kelola yang baik akan lebih dipercaya oleh masyarakat dan investor (Ikbal, 2018).

1.7 Manfaat dan Tantangan Indikator Non-Ekonomi

1.7.1 Manfaat

Dalam pembangunan ekonomi, indikator non-ekonomi memiliki manfaat yang penting karena memberikan informasi yang lebih lengkap dan holistik tentang kinerja perusahaan, tidak hanya dari segi keuangan tetapi juga dari segi sosial, lingkungan, dan tata kelola perusahaan, meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap perusahaan yang peduli terhadap aspek non-ekonomi, mendorong perusahaan untuk lebih bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnisnya, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Dengan menggunakan indikator non-ekonomi, pemerintah dapat memperoleh informasi yang lebih holistik dan komprehensif tentang pembangunan ekonomi, yang tidak hanya berfokus pada angka pendapatan atau produk nasional bruto (PNB).

1.7.2 Tantangan

Meskipun indikator non-ekonomi memiliki manfaat yang penting dalam pembangunan ekonomi, namun terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, antara lain sulitnya mengukur dan memantau indikator non-ekonomi, terutama yang bersifat kualitatif, tidak adanya standar yang

jelas dalam pengukuran indikator non-ekonomi, biaya yang tinggi dalam pengumpulan dan analisis data indikator non-ekonomi, tidak semua perusahaan memiliki kesadaran dan komitmen yang sama terhadap aspek non-ekonomi, dan tidak adanya sanksi yang tegas bagi perusahaan yang tidak memenuhi standar indikator non-ekonomi.

Meskipun ada tantangan dalam penggunaan indikator non-ekonomi, namun manfaatnya yang besar bagi perusahaan dan masyarakat membuat penggunaannya semakin penting. Perusahaan perlu memperhatikan aspek non-ekonomi dalam menjalankan bisnisnya agar dapat mencapai keberlanjutan dan keberhasilan jangka panjang.

BAB II

ISU LINGKUNGAN

2.1 Definisi Isu Lingkungan

Isu lingkungan menjadi perhatian dunia sejak beberapa dekade yang lalu. Sejak Konferensi Lingkungan Manusia, juga dikenal sebagai Konferensi Stockholm pada tahun 1972, masalah lingkungan menjadi lebih penting. Konferensi ini menetapkan dasar untuk peraturan perlindungan lingkungan di seluruh dunia dan hubungan pembangunan dengan alam dan manusia (BSILHK, 2022). Isu lingkungan semakin menjadi perhatian dunia setelah terjadinya peristiwa besar seperti bencana alam dan kebakaran hutan yang terjadi di berbagai belahan dunia.

Permasalahan lingkungan mengacu pada gangguan pada fungsi normal ekosistem, yang dapat disebabkan oleh manusia atau terjadi secara alami (Kalogirou, 2012). Masalah-masalah ini dianggap serius ketika ekosistem tidak dapat pulih seperti saat ini, dan menjadi bencana besar jika ekosistem diperkirakan akan runtuh. Contoh masalah lingkungan hidup adalah perubahan iklim, polusi, degradasi lingkungan, dan penipisan sumber daya. United Nations Environment Programme (UNEP) telah mendefinisikan sembilan masalah lingkungan global, termasuk penipisan lapisan ozon, perubahan iklim, dan hilangnya keanekaragaman hayati (Kanagawa, 2011). Permasalahan lingkungan dapat bersifat tersebar dan melintasi batas negara.

Berbagai program perlindungan lingkungan hidup dilakukan pada tingkat individu, organisasi, dan pemerintahan dengan tujuan menciptakan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup. Beberapa solusi umum terhadap permasalahan lingkungan hidup adalah dengan mengganti barang-barang yang dapat dibuang dengan barang-barang yang dapat digunakan kembali, menghindari penggunaan kertas, menghemat air dan listrik, mendukung praktik ramah lingkungan, dan mendaur ulang sampah.

2.2 Dampak Isu Lingkungan Terhadap Kemanusiaan dan Ekosistem

Masalah lingkungan mempunyai dampak yang signifikan terhadap kemanusiaan dan ekosistem. Beberapa dampak negatif terhadap kemanusiaan, yaitu masalah lingkungan seperti polusi dapat menyebabkan gangguan pernafasan, kanker, dan masalah kesehatan lainnya, masalah lingkungan dapat menyebabkan kerugian ekonomi karena kerusakan infrastruktur, hilangnya hasil panen, dan faktor lainnya, masalah lingkungan seperti perubahan iklim dapat menyebabkan perpindahan penduduk akibat naiknya permukaan air laut, kekeringan, dan faktor lainnya, masalah lingkungan yakni penggundulan hutan dan degradasi tanah dapat menyebabkan kerawanan pangan, masalah lingkungan seperti polusi dan penggunaan sumber daya air yang berlebihan dapat menyebabkan kelangkaan air.

Terdapat juga dampak negatif terhadap ekosistem seperti masalah lingkungan seperti penggundulan hutan dan urbanisasi dapat menyebabkan hilangnya habitat banyak spesies, masalah lingkungan seperti polusi dan perubahan iklim dapat menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, masalah lingkungan seperti penggunaan lahan yang berlebihan dan polusi dapat menyebabkan degradasi tanah, yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman pangan dan tanaman lainnya, masalah lingkungan seperti limbah industri dan limbah pertanian dapat menyebabkan pencemaran air, yang dapat membahayakan kehidupan akuatik dan membuat air tidak aman untuk dikonsumsi manusia, masalah lingkungan seperti emisi gas rumah kaca dapat menyebabkan perubahan iklim, yang dapat berdampak signifikan terhadap ekosistem dan spesies yang menghuninya.

Selain itu, terdapat dampak positif terhadap kemanusiaan, seperti masalah lingkungan dapat meningkatkan kesadaran dan upaya konservasi untuk melindungi ekosistem dan spesies yang menghuninya, masalah lingkungan dapat mengarah pada inovasi dalam teknologi dan praktik untuk mengurangi dampak negatif

terhadap lingkungan, masalah lingkungan dapat mengarah pada pengembangan praktik yang lebih sehat dan berkelanjutan, yang dapat berdampak positif pada kesehatan manusia.

Adapun dampak positif terhadap ekosistem, yaitu masalah lingkungan dapat mengarah pada upaya restorasi untuk memulihkan ekosistem dan habitat yang rusak, masalah lingkungan dapat mengarah pada peningkatan perlindungan ekosistem dan spesies yang menghuninya, masalah lingkungan dapat mengarah pada peningkatan upaya konservasi untuk melindungi keanekaragaman hayati dan melestarikan sumber daya alam.

Singkatnya, permasalahan lingkungan mempunyai dampak yang signifikan terhadap umat manusia dan ekosistem. Dampak negatifnya meliputi gangguan kesehatan, kerugian ekonomi, hilangnya habitat, dan hilangnya keanekaragaman hayati, sedangkan dampak positifnya mencakup peningkatan kesadaran dan upaya konservasi, inovasi, serta restorasi dan perlindungan ekosistem.

2.3 Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan adalah masuknya zat atau energi berbahaya ke dalam lingkungan yang menyebabkan dampak yang tidak diinginkan terhadap lingkungan dan organisme hidup. Bahan berbahaya ini disebut polutan dan dapat berasal dari alam atau buatan manusia (National Geographic, 2023). Pencemaran lingkungan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran suara, bahkan hingga pencemaran cahaya.

Contoh polutan lingkungan termasuk bahan kimia, partikel, gas rumah kaca, bahan radioaktif, dan kebisingan. Polutan-polutan ini dapat menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia, seperti gangguan pernafasan, kanker, dan masalah kesehatan lainnya (Hussain & Keçili, 2020). Mereka juga dapat merusak ekosistem, menyebabkan hilangnya habitat, hilangnya keanekaragaman hayati, dan degradasi tanah.

2.4 Perubahan Iklim

Perubahan iklim mengacu pada perubahan jangka panjang dalam pola cuaca rata-rata yang menentukan iklim lokal, regional, dan global di bumi. Ini biasanya merupakan bentuk variasi signifikan dari kondisi cuaca rata-rata yang menjadi, misalnya, menjadi lebih hangat, lebih basah, atau lebih kering, selama beberapa dekade atau lebih lama. Perubahan iklim dapat terjadi secara alami, namun kenaikan suhu rata-rata global saat ini lebih cepat dibandingkan perubahan sebelumnya dan terutama disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, penggundulan hutan, dan beberapa praktik pertanian dan industri yang menambah gas rumah kaca, terutama karbon dioksida dan metana (NASA, 2023).

Perubahan iklim menyebabkan berbagai dampak yang semakin meningkat terhadap lingkungan, seperti meluasnya gurun pasir, gelombang panas dan kebakaran hutan yang lebih sering terjadi, pencairan lapisan es, mundurnya gletser, hilangnya es laut, badai yang lebih hebat, kekeringan, dan cuaca ekstrem lainnya. Perubahan iklim juga menyebabkan perubahan lingkungan yang cepat di pegunungan, terumbu karang, yang turut mengancam banyak spesies punah.

Perubahan iklim berbeda dengan cuaca yang menggambarkan kondisi luar saat ini di suatu tempat tertentu. Perubahan iklim adalah masalah global yang memerlukan solusi global, dan banyak negara telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memitigasi dampak perubahan iklim.

2.5 Kehilangan Keanekaragaman Hayati

Hilangnya keanekaragaman hayati mengacu pada berkurangnya atau lenyapnya keanekaragaman makhluk hidup yang menghuni planet ini, termasuk menurun atau lenyapnya keanekaragaman hayati, keanekaragaman genetik, dan pola alami yang ada dalam ekosistem. Hilangnya keanekaragaman hayati dapat terjadi pada skala yang berbeda-beda, mulai dari

kepunahan global hingga kepunahan populasi, sehingga mengakibatkan penurunan keanekaragaman total pada skala yang sama. Hilangnya keanekaragaman hayati dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain perusakan habitat, perubahan iklim, polusi, eksploitasi satwa liar, dan pengaruh manusia (European Parliament, 2021).

Hilangnya keanekaragaman hayati juga mengancam struktur dan fungsinya ekosistem, sehingga mengurangi kompleksitas ekosistem, karena peran yang pernah dimainkan oleh banyak spesies atau individu yang berinteraksi kini dimainkan oleh lebih sedikit atau bahkan tidak sama sekali. Hilangnya keanekaragaman hayati tidak hanya mengakibatkan kepunahan spesies, namun juga berdampak pada manusia dengan hilangnya akses umat manusia terhadap jasa-jasa yang disediakan oleh ekosistem alami, seperti kekayaan oksigen yang kita hirup atau manfaat penyerbukan yang diberikan oleh hewan dalam menjamin keamanan pangan global.

2.6 Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah suatu pendekatan pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ini adalah cara mengatur masyarakat agar dapat eksis dalam jangka panjang, dengan mempertimbangkan kepentingan saat ini dan masa depan, seperti pelestarian lingkungan dan sumber daya alam atau keadilan sosial dan ekonomi.

Konsep pembangunan berkelanjutan pertama kali dicetuskan pada tahun 1980, dan definisi yang paling banyak dikutip berasal dari Laporan Brundtland, yang mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai “pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri” (YouMatter, 2020). Pembangunan berkelanjutan bukan hanya tentang lingkungan hidup tetapi juga tentang

memastikan masyarakat yang kuat, sehat, dan adil, memenuhi beragam kebutuhan semua orang di komunitas saat ini dan masa depan, meningkatkan kesejahteraan pribadi, kohesi dan inklusi sosial, dan menciptakan peluang yang setara. .

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah kumpulan 17 tujuan yang bertujuan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, termasuk kelangsungan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan memerlukan pembatasan aktivitas manusia, pengembangan teknologi yang hemat input, dan memastikan bahwa tingkat konsumsi tidak melebihi tingkat keselamatan.

2.7 Tantangan dan Hambatan dalam Menangani Isu Lingkungan

Tantangan dan hambatan dalam menangani permasalahan lingkungan hidup sangat kompleks. Beberapa tantangan dan hambatan utama antara lain sebagai berikut:

1. Sifat multi-disiplin
Permasalahan lingkungan bersifat multi-disiplin, dan memerlukan integrasi ilmu pengetahuan alam dan ilmu sosial untuk menyelesaikannya. Hal ini menyulitkan pengembangan solusi komprehensif yang mengatasi semua aspek masalah.
2. Permasalahan lintas batas dan lintas yurisdiksi
Permasalahan lingkungan hidup tersebar dan melintasi batas dan yurisdiksi, sehingga sulit untuk menegakkan kebijakan perlindungan lingkungan.
3. Kurangnya kemauan politik
Kebijakan perlindungan lingkungan memerlukan kemauan politik untuk diterapkan, dan beberapa pemerintah mungkin memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dibandingkan perlindungan lingkungan.

4. Keterbatasan teknologi
Beberapa masalah lingkungan memerlukan solusi teknologi, dan pengembangan solusi tersebut dapat menjadi tantangan.
5. Kendala ekonomi
Kebijakan perlindungan lingkungan bisa memakan biaya yang besar untuk diterapkan, dan beberapa pelaku usaha mungkin menolak kebijakan tersebut karena potensi dampaknya terhadap keuntungan mereka.
6. Kurangnya kesadaran masyarakat
Banyak orang tidak menyadari betapa parahnya permasalahan lingkungan hidup, dan hal ini dapat menyulitkan upaya membangun dukungan masyarakat terhadap kebijakan perlindungan lingkungan hidup.
7. Perubahan iklim
Perubahan iklim adalah masalah kompleks dan global yang memerlukan kerja sama internasional untuk mengatasinya, dan hal ini menimbulkan tantangan signifikan terhadap perlindungan lingkungan.
8. Kelebihan populasi
Populasi dunia bertambah dengan cepat, dan hal ini memberikan tekanan pada sumber daya alam dan lingkungan.

BAB III

ISU SOSIAL

3.1 Definisi Isu Sosial

Isu sosial non-ekonomi meliputi berbagai masalah sosial yang tidak berkaitan dengan aspek ekonomi, seperti ketimpangan sosial meliputi masalah ketidakseimbangan atau jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan status sosial ekonomi atau budaya. Hal ini dapat menyebabkan masalah seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, dan kriminalitas. Selain itu, masalah pendidikan meliputi masalah seperti akses pendidikan, kualitas pendidikan, dan kesenjangan pendidikan. Hal ini dapat menyebabkan masalah seperti rendahnya tingkat literasi dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Terdapat masalah politik meliputi masalah seperti korupsi, ketidakadilan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini dapat menyebabkan masalah seperti ketidakstabilan politik dan sosial. Kemudian, terdapat masalah kesehatan meliputi masalah seperti penyakit menular dan kesehatan mental. Hal ini dapat menyebabkan masalah seperti penyebaran penyakit dan rendahnya kualitas hidup. Selain itu, terdapat masalah lingkungan meliputi masalah seperti polusi dan perubahan iklim. Hal ini dapat menyebabkan masalah seperti kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat yang buruk.

3.2 Upaya dalam Menangani Isu Sosial

Isu sosial non-ekonomi memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial non-ekonomi tersebut. Dalam menangani dampak isu sosial non-ekonomi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pemerataan pembangunan dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi antar wilayah (Sugiastuti & Pratama, 2022). Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan dan

program yang berfokus pada pengembangan wilayah yang tertinggal dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Lalu, Peningkatan akses pendidikan dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi kesenjangan pendidikan. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan dan program yang berfokus pada peningkatan akses pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan. Selanjutnya, Pemberantasan korupsi dapat membantu mengurangi masalah politik dan meningkatkan stabilitas politik dan sosial. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan dan program yang berfokus pada pemberantasan korupsi dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah (Malindar & Oratmangun, 2021). Selain itu, Peningkatan kesehatan masyarakat dapat membantu mengurangi masalah kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan dan program yang berfokus pada peningkatan akses kesehatan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan. Terdapat juga pengelolaan lingkungan yang baik dapat membantu mengurangi masalah lingkungan dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan dan program yang berfokus pada pengelolaan lingkungan yang baik dan berkelanjutan.

BAB IV

ISU TATA KELOLA

4.1 Definisi Isu Tata Kelola

Isu tata kelola mencakup suatu kebijakan, prosedur, dan struktur yang menetapkan bagaimana suatu organisasi dijalankan. Isu tata kelola biasanya terdiri dari pengambilan keputusan, akuntabilitas, evaluasi kinerja perusahaan, strategi operasional, dan lainnya (Emerick, 2021). Isu tata kelola adalah pertimbangan yang penting bagi suatu organisasi dalam menilai kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola dari organisasi. Semakin baik tata kelola dari suatu organisasi, maka akan semakin baik pula hasilnya, dan sangat penting bagi organisasi untuk mematuhi peraturan undang-undang terkait tata kelola yang relevan (Bevir, 2023). Pelaporan terkait praktik tata kelola melalui laporan keberlanjutan dapat membantu organisasi untuk memantau dan meningkatkan praktik tata kelola. *Stakeholders* juga harus terlibat untuk memahami keprihatinan dan pandangan mereka terhadap isu tata kelola serta menunjukkan komitmen perusahaan untuk memiliki tata kelola yang baik. Isu tata kelola bisa muncul dalam beberapa konteks, seperti tata kelola perusahaan, tata kelola negara, dan tata kelola internasional.

4.2 Upaya dalam Menangani Isu Tata Kelola

Isu tata kelola memberikan pengaruh signifikan terhadap evaluasi kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola dari suatu organisasi. Dengan demikian, diperlukan suatu upaya untuk menangani isu-isu tersebut. Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menangani isu tata kelola. Pertama, kebijakan dan prosedur tentang pengambilan keputusan, akuntabilitas, dan transparansi harus dikembangkan oleh organisasi. Hal ini termasuk pengembangan kode etik, kebijakan anti-korupsi, serta kebijakan pengelolaan keuangan. Kedua,

organisasi juga perlu untuk menerapkan kebijakan dan prosedurnya secara efektif, seperti memberikan pelatihan karyawan, pemantauan kepatuhan, dan pelaporan kemajuan (Ryabota et al., 2019). Ketiga, organisasi juga harus mematuhi peraturan dan undang-undang terkait tata kelola. Hal ini mencakup peraturan tentang pelaporan keuangan, perpajakan, dan praktik ketenagakerjaan (Emerick, 2021). Kemudian, organisasi bisa melaporkan praktik tata kelola yang mereka lakukan melalui pelaporan keberlanjutan, yang mencakup pelaporan tentang kebijakan dan prosedur yang terkait dengan pengambilan keputusan, akuntabilitas, dan transparansi, serta menunjukkan bagaimana perusahaan mengatasi permasalahan ini (Bevir, 2023). Terakhir, organisasi juga perlu untuk melibatkan *stakeholders*, termasuk karyawan, pelanggan, dan komunitas lokal, untuk mengetahui kekhawatiran dan pandangan mereka terhadap isu-isu tata kelola. Hal ini bisa membantu organisasi dalam pengembangan kebijakan dan prosedur yang efektif dan menunjukkan komitmen mereka terhadap tata kelola yang baik (Farnham, 2022).

BAB V

PEMAHAMAN UMKM DI NEGARA BERKEMBANG

5.1 Definisi UMKM

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, kecil, atau menengah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, serta memiliki karyawan kurang dari 250 orang. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, karena memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan (Mohamadi, 2023). Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait terus berupaya untuk meningkatkan dukungan dan aksesibilitas bagi UMKM dalam rangka meningkatkan kinerja dan kontribusi UMKM bagi perekonomian nasional.

5.2 Peran UMKM dalam Perekonomian Negara Berkembang

UMKM memiliki peran yang besar dalam perekonomian Indonesia, karena menyerap sebagian besar tenaga kerja dan mampu mendorong kemajuan ekonomi negara. Meskipun terkesan kecil, UMKM memiliki dampak yang signifikan bagi perekonomian Indonesia (Sofyan, 2017). Beberapa peran UMKM, seperti sarana pemerataan ekonomi. UMKM dapat membantu masyarakat kecil untuk keluar dari jurang kemiskinan dan